

Analisis Perbedaan : Mengungkap Kesan dan Analisis Strategis Terhadap Sistem Negara Indonesia dan Jepang

Revalina Aulia Sabrina *¹
Michaelia Alriviany Putri ²
Silvia Devi Meitasari ³
Sri Ayu Endang Setyoningrum ⁴
Ari Metalin Ika Puspita ⁵

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: revalina.23136@mhs.unesa.ac.id¹, michaelia.23054@mhs.unesa.ac.id², silvia.23209@mhs.unesa.ac.id³, sri.23030@mhs.unesa.ac.id⁴, aripuspita@unesa.ac.id⁵

Abstrak

Artikel ini mengulas perbedaan sistem negara antara Indonesia dan Jepang serta implikasinya secara strategis. Sistem Ketatanegaraan memiliki keterlibatan demi menjaga kestabilan dan perkembangan negara itu sendiri. Melalui analisis mendalam, artikel ini menguraikan struktur pemerintahan, prinsip dasar, sistem politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya dengan membandingkan dua negara yaitu Indonesia dan Jepang. Selain itu, artikel ini juga menandai kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem negara serta meninjau kesempatan dan tantangan yang dihadapi. Dengan meninjau pembelajaran dari perbedaan ini, artikel ini menawarkan strategi pengembangan untuk memperkuat sistem negara Indonesia dengan merujuk pada praktik terbaik dari Jepang dengan metode penelitian ini menggunakan Library Research (Studi Literatur). Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang perbedaan ini memberikan wawasan penting untuk mengarahkan kebijakan dan langkah-langkah strategis menuju pembangunan yang lebih baik bagi kedua negara dalam konteks globalisasi dan dinamika geopolitik saat ini.

Kata kunci: Analisis, Indonesia, Jepang, Perbedaan Sistem Negara, Sistem Ketatanegaraan

Abstract

This article discusses the differences in the state systems between Indonesia and Japan and their strategic implications. The Constitutional System involves engagement to maintain the stability and development of the respective countries. Through in-depth analysis, this article elaborates on the governmental structure, basic principles, political, economic, educational, and cultural systems by comparing the two countries, Indonesia and Japan. Additionally, the article also identifies the strengths and weaknesses of each state system and reviews the opportunities and challenges faced. By examining the lessons from these differences, this article offers development strategies to strengthen Indonesia's state system by referring to best practices from Japan. This research method utilizes Library Research (Literature Study). In conclusion, a profound understanding of these differences provides important insights to guide policies and strategic steps towards better development for both countries in the context of globalization and current geopolitical dynamics.

Keywords: Analysis, Constitutional System, Differences in State Systems, Indonesia, Japan

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan atau biasa disebut sebagai susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi negara, baik ditinjau dari susunan serta kedudukan lembaga-lembaga negara yang berhubungan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang yang diperoleh dari masing-masing lembaga tersebut harus terdapat pembagian atau pemisahan yang diharapkan dapat berguna bagi parameter masing-masing lembaga. Suatu prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan saja, namun juga tercermin pada struktur mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang akan menjamin tegaknya sistem hukum dan memastikan pulberfungsinya sistem demokrasi.

Sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara tentunya tidak hanya mencerminkan

struktur formal pemerintahan saja, melainkan juga menggambarkan nilai, prinsip, dan kebijakan yang membuat landasan untuk stabilitas dalam perkembangan suatu bangsa. Indonesia dan Jepang, merupakan dua negara yang berbeda yang dapat dilihat secara geografis, budaya, sejarah, serta memiliki sistem negara masing-masing yang unik dengan implikasi yang signifikan secara strategis. Melalui analisis mendalam terhadap struktur pemerintahan, prinsip dasar, sistem politik, ekonomi, pendidikan, serta budaya, kita dapat menginvestigasi perbedaan antar kedua negara ini serta dampaknya terhadap arah pembangunannya masing-masing.

Artikel ini memiliki tujuan menyajikan informasi tentang perbedaan sistem negara antara Indonesia dan Jepang, dan implikasinya secara strategis. Dengan menggunakan metode penelitian studi literatur, kami akan membandingkan dan menelaah karakteristik serta kunci dari kedua sistem negara Indonesia dan Jepang. Selain itu, kami juga akan mengamati kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta meninjau kesempatan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks global dan dinamika geopolitik saat ini. Dengan adanya pengetahuan pembelajaran dari perbedaan ini, artikel ini akan menyajikan strategi pengembangan untuk memperkuat sistem negara Indonesia dengan merujuk pada praktik terbaik dari Jepang. Pemahaman tentang kebijakan perbedaan ini nantinya diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemangku kebijakan untuk mengarahkan langkah-langkah strategis menuju pembangunan yang lebih baik lagi untuk negara Indonesia dan Jepang

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Library Research. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode pendekatan analisis studi literatur untuk menghasilkan pandangan yang komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan antar kedua negara dengan meninjau perbedaan-perbedaan tersebut secara detail untuk menggali kesan dan analisis strategis antara negara Indonesia dan Jepang, dapat kita petik pelajaran dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Komponen penelitian kualitatif mencakup mengumpulkan wawasan dan perspektif dari berbagai sumber secara mendalam. Studi literatur menyertakan secara sistematis melacak dan melakukan analisis secara teliti jurnal akademik dan sumber terpercaya lainnya untuk mencatat informasi, teori, konsep, dan kajian empiris utama mengenai sistem ketatanegaraan antara Negara Indonesia dan Jepang. Hal ini dapat membantu untuk menciptakan landasan teoritis untuk studi ini dan menyajikan pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi pengetahuan terkini di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini menganalisis perbedaan sistem negara antara Indonesia dan Jepang serta implikasinya secara strategis. Metode studi literatur digunakan untuk membandingkan dan menganalisis karakteristik serta kunci dari kedua sistem negara ini. Hasil penelitian menyoroti bahwa sistem ketatanegaraan mencakup struktur, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara serta hubungan antar lembaga tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi tegaknya sistem hukum dan demokrasi.

Sistem ketatanegaraan tidak hanya mencerminkan struktur pemerintahan formal, tetapi juga nilai-nilai, prinsip, dan kebijakan yang menjadi pijakan bagi stabilitas pembangunan suatu bangsa. Meskipun Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan geografis, budaya, dan sejarah, keduanya memiliki implikasi strategis yang signifikan.

Sistem Negara Indonesia

Sistem negara Indonesia, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, adalah hasil dari perjalanan panjang dalam pembentukan tatanan pemerintahan yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan aspirasi bangsa. Dengan beragam aspek politik, sosial, dan budaya yang

kaya, sistem ini menghadapi tantangan dan dinamika yang unik dalam menjagastabilitas politik dan keadilan sosial.

Struktur Pemerintahan Indonesia

Ajaran pemisahan kekuasaan (Trias Politica) yang diprakarsai oleh Montesquieu mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia yang menganut model presidential. Hal ini jelas terlihat dalam UUD 1945 dan hasil perubahannya yang memperkuat sistem pemerintahan ini. Indonesia memiliki tiga organ negara yang menjalankan kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif, yang membuat Undang-Undang, diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eksekutif, yang melaksanakan UU, dipimpin oleh Presiden atau Perdana Menteri. Sedangkan yudikatif, yang menegakkan hukum, dijalankan oleh Mahkamah Agung. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang sejajar, mengikuti teori Trias Politica.

Legislatif diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya berasal dari partai politik dan dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kedudukan di tingkat pusat dan provinsi, dengan fungsi legislasi (pembuatan UU), anggaran (menetapkan APBN), dan pengawasan terhadap pemerintahan. Eksekutif, dipegang oleh Presiden, memiliki wewenang eksekutif dan sebagai Kepala Negara serta Kepala Pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan memiliki masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang sekali. Yudikatif, yang menegakkan hukum, melibatkan Mahkamah Agung (MA) untuk peradilan kasasi, Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pengujian konstitusionalitas, dan Komisi Yudisial untuk pengusulan calonhakim agung dan menjaga integritas hakim.

Kebijakan Politik di Indonesia

Kebijakan politik di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mengatur struktur politik, sosial, dan ekonomi negara. Ini termasuk kebijakan dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pertahanan, dan bidang lainnya, yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Sejarah politik Indonesia mencakup masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pergantian kepemimpinan, peristiwa sejarah, dan dinamika politik. Indonesia mengutamakan prinsip kedaulatan rakyat dengan pemilihan umum setiap lima tahun. Contoh kebijakan politik meliputi reformasi politik pasca Orde Baru, kebijakan ekonomi deregulasi untuk investasi, kebijakan lingkungan, dan upaya pemerataan pembangunan serta promosi pluralisme dan perdamaian. Kebijakan politik juga terkait dengan isu global seperti diplomasi, perdagangan internasional, dan keamanan regional.

Sistem Negara Jepang

Pada masa modern, Jepang memiliki sistem pemerintahan yang lebih kompleks dan terorganisir. Sistem ini didasarkan pada konstitusi yang diperbarui setelah Perang Dunia II dan mengadopsi elemen-elemen dari sistem pemerintahan barat, seperti sistem parlementer. Kaisar Jepang berfungsi sebagai simbol kekuasaan negara, sementara perdana menteri memimpin pemerintahan. Sistem ini telah mengalami beberapa perubahan seiring waktu, termasuk pengadopsian sistem ekonomi liberal dan peningkatan peran politik luar negeri.

Struktur Pemerintahan Jepang

Pemerintahan Jepang memiliki struktur yang terdiri dari beberapa lembaga utama. Kaisar, sebagai simbol negara, melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam urusan kenegaraan dengan saran dan persetujuan Kabinet. Diet Nasional, terdiri dari dua majelis, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat, merupakan badan pembuat undang-undang yang tertinggi, dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri,

bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif dan harus mengundurkan diri dalam situasi tertentu. Pengadilan dipegang oleh Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya, di mana hakim-hakimnya diangkat oleh Kabinet. Pemerintahan daerah juga ada, dengan 47 pemerintah daerah tingkat prefektur dan lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah, yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh penduduk setempat.

Kebijakan Politik di Jepang

Munculnya Jepang sebagai Negara penjajah setelah kurang lebih dua abad lamanya menerapkan politik isolasi dari tahun 1639 sampai dengan tahun 1854, ini dilakukan dalam upaya menghindarkan diri dari pengaruh kebudayaan dan tradisi Barat terhadap kebudayaan dan tradisi Jepang, penduduk dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri, kapal-kapal dirusak supaya tidak dapat dipergunakan dan menutup diri terhadap kedatangan orang barat ke Jepang.

Namun kebijakan itu kemudian ditinggalkan sejak Jepang diperintah oleh Tenno Meiji tahun 1867, dengan kebijakan mereformasi Jepang yang terkenal dengan nama Restorasi Meiji pada tanggal 14 Desember 1868. yakni: Dalam bidang pemerintahan langkah yang ditempuh adalah memindahkan ibu kota Negara dari Kyoto ke Tokyo, dalam bidang pendidikan dijalankan pendidikan dengan sistem Barat, dengan cara sekolah merupakan tempat pendidikan klasik, kewajiban belajar dijalankan untuk anak yang berumur enam tahun dengan mengadakan Sekolah Dasar yang cukup, setiap daerah didirikan Sekolah menengah dan Universitas/ Perguruan Tinggi, dikirim mahasiswa keluar negeri. Dalam bidang ekonomi terjadi perkembangan yang sangat pesat dibidang Pertanian yang merupakan dasar utama perekonomian dikembangkan secara intensif, sehingga dalam tempo tiga puluh tahun produksi dapat meningkat dua kali lip, industri tekstil berkembang sangat pesat, memerlukan impor kapas sebagai bahan mentahnya. Industri besi baja meningkat pesat dalam tahun 1896 produksinya baru satu metrik ton pada tahun 1913 meningkat menjadi 255 metrik ton, perusahaan perkapalan memperoleh bantuan dari pemerintah sehingga tahun 1913 ada enam perusahaan perkapalan sudah mampu membuat kapal yang berukuran besar seribu ton atau lebih, Dalam bidang kemiliteran juga terjadi kemajuan yang sangat pesat.

Aspek	Indonesia	Jepang
Struktur Pemerintahan	Republik dengan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sistem perwakilan dengan parlemen satu kamar (DPR) yang dipilih secara langsung.	Monarki konstitusional dengan kaisar sebagai kepala negara yang peranannya dibatasi oleh konstitusi. Sistem perwakilan dengan parlemen bicameral yang terdiri dari Dewan Penasihat (House of Councillors) dan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives).
	Berfokus pada pembangunan negara demokratis dan	Kebijakan politik selama pendudukan di Indonesia pada masa Perang Dunia II

Kebijakan Politik	berkeadilan. Kebijakan politik bertujuan untuk memperkuat demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan infrastruktur.	meliputi pengeksploitasian sumber daya Indonesia untuk kepentingan perang. Setelah itu, fokus pada pembangunan ekonomi dan teknologi dengan penekanan pada inovasi dan efesiensi.
Sejarah dan Budaya	Sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan penjajahan, serta budaya pluralisme dengan keragaman etnis, bahasa, dan agama.	Sejarah sebagai negara penjajah di masa lampau dengan fokus pada inovasi teknologi dan keunggulan ekonomi. Budaya yang kental dengan tradisi dan nilai-nilai konvensional, di samping modernitas yang berkembang pesat.

Gambar 1. Perbandingan Sistem Negara Indonesia dan Jepang

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Negara Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia yang berbasis republik dan demokratis menyebutkan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar memperkuat sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia. Sistem tersebut juga membuat rakyat dan lembaga legislatif atau badan perwakilan aktif dalam pengambilan keputusan.

Dari kelebihan mengenai sistem negara Indonesia, rupanya masih kerap terjadi kesenjangan akses dan hukum antar wilayah, distribusi hukum yang tidak merata, sehingga memengaruhi kualitas hukum. Sistem Pemerintahan Indonesia yang menyangkut parlementer dan demokrasi biasanya memiliki ketergantungan pada kekuatan partai politik sehingga dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Kekuasaan Presiden Indonesia juga dibatasi oleh konstitusi dan harus bekerja dalam kerangka sistem perwakilan yang relatif lemah sehingga kedua faktor tersebut menjadikan kekurangan terhadap sistem negara Indonesia.

Dampak Sistem Negara Indonesia terhadap Masyarakat

Sistem pemerintahan dan kebijakan politik negara Indonesia memengaruhi cara hidup masyarakat Indonesia dari berbagai aspek. Sistem Indonesia yang demokratis mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, memudahkan akses dalam bidang pendidikan dan meningkatkan kesadaran nasional atas rendahnya minat dari budaya membaca di Indonesia. Dalam bidang pertahanan dan keamanan juga sistem pemerintahan memberikan wewenang bagi organisasi militer yakni, Tentara Nasional Indonesia(TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan UUD NRI 1945.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Negara Jepang

Jepang memiliki sistem perwakilan yang kuat yaitu strong bicameral dengan dua kubu, sehingga memungkinkan perdebatan yang lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan dan stabilitas politik. Dalam struktur pemerintahan yang memengaruhi keberlangsungan sistem negara, Kaisar Jepang berfungsi sebagai "kepala keluarga" dan memimpin negara dengan bantuan Perdana Menteri, yang menjadikan koordinasi secara efektif antara pemerintahan dan keluarga kekaisaran.

Selain menjadi kelebihan, kekuasaan Kaisar Jepang tidak memiliki kuasa mutlak dan dibatasi oleh konstitusi. Sehingga, dapat mengganggu stabilitas pemerintahan jika Kaisar tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengambil keputusan. Karena adanya pembatasan kekuasaan Kaisar, hal itu pula menyebabkan berkurangnya peran rakyat dalam mengambil keputusan dan menjadikan ketergantungan pada Kaisar

Dampak Sistem Negara Jepang terhadap Masyarakat

Sistem pemerintahan Monarkhi Konstitusional Jepang memengaruhi cara hidup masyarakat Jepang, termasuk budaya belajar, budaya sikap hormat, budaya kebersihan, budaya transportasi, dan budaya kebersamaannya. Jepang memiliki kebijakan politik yang berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia di masa pendudukan Jepang di Indonesia. Selain itu, melalui sistem pemerintahan dan kebijakan politik di Jepang menyebabkan pesatnya perkembangan di berbagai bidang terutama pada pendidikan yang inklusif, perekonomian yang intensif dari perkembangan pertanian dan beragam industri serta dalam bidang pertahanan dan keamanan melalui organisasi militer Jepang.

Potensi Perbaikan Sistem Negara Indonesia

Perbaikan sistem Negara Indonesia memerlukan perhatian pada beberapa aspek utama. Pertama, perbaikan dalam sistem pemerintahan harus fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Kedua, sistem hukum perlu diperbaiki agar lebih adil dan efisien dengan meningkatkan aksesibilitas hukum serta kapasitas institusi hukum dalam menangani kasus-kasus. Ketiga, dalam sistem politik, stabilitas dan inklusivitas dapat ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat yang lebih aktif, peningkatan kualitas partai politik, dan lembaga-lembaga politik lainnya. Keempat, perbaikan dalam bidang pendidikan harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Terakhir, sistem keamanan perlu diperbaiki dengan meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan responsivitasnya terhadap ancaman yang ada.

Ancaman terhadap Sistem Negara Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dengan berbagai keanekaragaman sosial budaya dapat dipastikan memiliki tantangan dan ancaman yang kompleks. Tantangan dan ancaman yang dihadapi Negara Indonesia setiap harinya selalu berbeda-beda, ada yang hingga saat ini masih belum bisa terselesaikan. Beberapa tantangan dan ancaman terhadap sistem Negara Indonesia antara lain :

- A. Kriminal umum dan kejahatan terorganisir lintas negara, separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi dan siber.
- B. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi berupa penurunan kualitas pekerjaan, peningkatan pengangguran dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Namun, ancaman ini dapat diantisipasi dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan meningkatkan investasi dan meningkatkan kemampuan industri

nasional dalam menghadapi persaingan global.

- C. Perubahan geopolitik global memiliki dampak pada perekonomian nasional berupa perang antara Ukraina dan Rusia yang menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia seperti peningkatan harga pangan dan energi dalam sektor keuangan
- D. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sesuai harapan dikarenakan kesenjangan akses dan pendidikan antar wilayah, distribusi guru yang tidak merata serta banyaknya kualitas lulusan yang rendah.
- E. Kualitas hukum di Indonesia masih jauh dari harapan karena kesenjangan akses dan hukum antar wilayah, distribusi hukum yang tidak merata serta banyaknya ketidakadilan hukum

Strategi Pengembangan Sistem Negara Indonesia

Indonesia harus terus memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka. Pembangunan infrastruktur yang efektif akan memperbaiki pelayanan publik dan kemampuan pemerintahan. Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui investasi dan akses keuangan yang lebih baik. Pendidikan berkualitas akan mempersiapkan generasi masa depan, sementara adaptasi sistem informasi dengan budaya dan teknologi lokal akan memperkuat peran masyarakat.

Potensi Perbaikan Sistem Negara Jepang

Sistem monarki konstitusional Jepang menawarkan stabilitas politik berkat pemerintahan parlementer yang membatasi kekuasaan raja atau ratu. Namun, kelemahan terletak pada sistem tidak langsung dalam pemilihan perdana menteri, yang dapat mengarah pada kekuasaan tidak langsung oleh kaisar dan partai politik dominan. Solusi potensial termasuk pemilihan langsung perdana menteri dan peningkatan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Negara Jepang bisa mengambil contoh dari Indonesia, yang memiliki sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan dengan pemilihan umum langsung dan mekanisme *checks and balances* yang efektif.

Ancaman terhadap Sistem Negara Jepang

Ancaman terhadap sistem negara Jepang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sistem monarki konstitusional Jepang yang menggabungkan unsur monarki dengan sistem pemerintahan konstitusional dapat menjadi rentan terhadap perubahan jika terjadi pergeseran kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Kedua, sistem pemerintahan Jepang yang parlementer dapat terancam jika terjadi ketidakstabilan dalam sistem politik, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan atau konflik antara partai politik yang signifikan. Ketiga, Jepang sebagai negara maju dengan ekonomi yang sangat besar dapat terancam oleh perubahan global dan geopolitik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik negara. Keempat, Jepang sebagai negara yang telah mengalami perang dan pendudukan, memiliki sejarah yang kompleks yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah mengalami beberapa pergantian Perdana Menteri yang dapat menunjukkan ketidakstabilan dalam sistem politik. Namun, Jepang telah menunjukkan kemampuan untuk menangani perubahan dan tetap stabil dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, untuk mempertahankan sistem negara Jepang, penting bagi negara ini untuk mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi, serta memantau perubahan global dan geopolitik yang dapat mempengaruhi negara tersebut.

Strategi Pengembangan Sistem Negara Jepang

Jepang telah melalui beberapa tahap dalam pengembangan sistem negaranya sejak awal abad ke-20. Dalam periode awal, fokusnya adalah pada bantuan pembangunan ekonomi kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan penekanan pada sektor industri manufaktur. Setelah Perang Dunia II, Jepang mengadopsi kebijakan perdamaian dan memusatkan pembangunan ekonominya pada infrastruktur sosial, sesuai dengan tradisi sosialnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah menekankan pengembangan teknologi pertahanan dan transformasi digital sebagai bagian dari strategi pembangunannya. Praktik bisnis berkelanjutan juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, dengan Jepang sebagai contoh sukses dalam hal ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, dapat diambil kesimpulan bahwa perbandingan antara sistem negara Indonesia dan Jepang mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam struktur, prinsip dasar, serta kebijakan yang memengaruhi pembangunan kedua negara tersebut. Meskipun keduanya memiliki karakteristik unik dan berbeda, namun pemahaman mendalam tentang perbedaan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan sistem negara masing-masing.

Dengan demikian, melalui pemahaman mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara sistem negara Indonesia dan Jepang, serta implementasi strategis dari saran-saran di atas, diharapkan kedua negara dapat mengarahkan langkah-langkah menuju pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Lia, D., & Irawan, H. (2022). PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN PERSEPEKTIF PENERAPAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2(1), 23-30.
- Haryanti, P. (2010). Pemerintahan Jepang.
- Pelu, H., Sinaga, J. S. S. J. S., Silubun, Y. L. S. Y. L., Fenetiruma, R. P. F. R. P., & Alputila, M. J. (2022). JCK PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(1), 22-35.
- Alunaza, H., & Putri, A. (2022). Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara: Resensi Buku. *Indonesian Perspective*, 7(1), 128-133.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kokusai, K. (2019). Evaluation of Japan's ODA to the Republic of Indonesia. Japan
- Hakim, Muhammad & Fahrina, Alia & Ali, Muhammad & Setramulya, Reva & Nurdiawan, Rizky. (2023). MAKALAH PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN JEPANG.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.
- Rasyidi, M. A. (2020). Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia dan Sistem Pemerintahan NKRI. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11(2).
- Mahmuzar, M. Hum (2013). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Nusa Media PO Box 137 Ujungberung, Bandung Bekerjasama dengan FEKONSOS UIN SUSKA

Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/55663/1/Buku%20Sistem%20pemerintahan%20Indonesia%20Menurut%20UUD%201945%20Sebelum%20dan%20Sesudah%20Amandemen.pdf>

Surahman, M. A. N. (2023). Legitimacy Of Democracy And The System Of Government In Indonesia. diakses pada 13 Mei 2024, dari https://www.academia.edu/107105123/LEGITIMACY_OF_DEMOCRACY_AND_THE_SYSTEM_OF_GOVERNMENT_IN_INDONESIA